

INDIKATOR PENYEBAB KETIMPANGAN PEREKONOMIAN
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH

Fajri Hadi

Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Aceh Barat
e-mail: fajrihadi.se@gmail.com**ABSTRACT**

This study was to analyze the growth economic and disparity between districts / cities in Aceh province. To see this inequality Aceh GDP data was used to the model and typology Klassen Williamson Index. The results showed that the rate coefficient of inequality of growth economic in the Province of Aceh has improved. This is indicated by the high coefficient of inequality from 2004 to 2014. Government spending and the number of people positive and significant effect in increasing the index of inequality across districts / cities in Aceh province. 51.09 percent of the variation of the index of income inequality can be explained by government spending and population, while the remaining 48.91 percent is explained by other factors outside the model. Williamson index analysis results showed in the district / city having a very high inequality in 2008 and continues to grow so that in the year 2014 fell limp below average although still at the level of inequality of growth with a high index, but were able to show better development, for example Aceh Barat Daya district in 2008 had a very high inequality with coefficient index at 0,862 and further declined in 2010 with the index of inequality for 0,761 coefficient index (IW) is below the average. To reduce the level of inequality between regions in the province of Aceh in the future, the Government of Aceh need to increase spending on capital expenditures for the Central Region and the South West and the creation of employment for encourage the growth of regional economic.

Keywords: *disparities, government expenditure, growth economic.*

PENDAHULUAN**Latar Belakang Penelitian**

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian yang terjadi sepanjang waktu untuk meningkatkan kondisi ekonomi menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan indikasi dari keberhasilan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah merupakan sebuah proses dalam mencapai kemajuan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama dan khusus dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat pada umumnya. Masalah kesenjangan pembangunan selalu menjadi topik yang menarik dalam melihat kondisi pertumbuhan ekonomi daerahnya. Belum adanya kesepakatan diantara para peneliti mengenai sumber-sumber kesenjangan pertumbuhan ekonomi membuka peluang untuk terus dilakukannya penelitian dan studi yang lebih mendalam. Ini ditunjukkan dari banyaknya publikasi penelitian-penelitian tentang kesenjangan pembangunan dan pertumbuhan regional yang telah dilakukan sampai saat ini. Demikian pula halnya studi tentang kesenjangan pembangunan regional di Provinsi Aceh.

Pembangunan regional di Indonesia khususnya selama pelaksanaan Repelita di masa orde baru lebih dimaksudkan sebagai pembangunan daerah (*local development*). Tujuannya, dirumuskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yaitu untuk (1) memelihara keseimbangan pembangunan antar sektor dan

antar wilayah, (2) memelihara keseimbangan ekonomi antar wilayah dan mencegah kesenjangan antar daerah, (3) meningkatkan prakarsa daerah dan peran serta masyarakat dalam pembangunan, dan (4) memelihara keserasian pembangunan antara pusat-pusat kegiatan pembangunan di wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan di sekitarnya (Jamal, 2008:2).

Menurut Sumodiningrat, pembangunan adalah proses natural mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu terwujudnya masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran yaitu meningkatnya konsumsi disebabkan meningkatnya pendapatan. Todaro mengungkapkan bahwa, pembangunan adalah proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, perilaku sosial, dan institusi nasional, disamping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan (Rezeki, 2007:1).

Akselerasi pembangunan akan lebih cepat dicapai jika terdapat keseimbangan pembangunan antar-daerah. Percepatan ini dapat dijelaskan misalnya jika terjadi penambahan dana pembangunan, akan lebih membawa dampak peningkatan pendapatan masyarakat melalui angka pengganda pengeluaran yang sama setiap daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang relatif merata dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi ini akan dapat menciptakan peluang kerja yang lebih besar dan tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Bila ini tercapai maka beban daerah-daerah tertentu dapat dikurangi karena berkurangnya penduduk yang melakukan perpindahan dari daerah pedesaan ke perkotaan. Perpindahan penduduk ini muncul sebagai akibat adanya ketimpangan pembangunan antar-daerah. Ada daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi di satu sisi tetapi di sisi lain ada daerah yang tertinggal tingkat pembangunan ekonominya (Aliasuddin, 2002: 27).

Daerah tertentu yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada daerah lain akan menghadapi beban perkotaan yang terus meningkat karena banyak penduduk dari pedesaan terus berpindah ke daerah tersebut. Kondisi ini terjadi karena adanya tarikan peluang kesempatan kerja yang lebih banyak di daerah perkotaan tersebut. Daerah perkotaan secara terus menerus mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena sumberdaya yang potensial terus berpindah ke daerah perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (Aliasuddin, 2002: 27).

Provinsi Aceh sebagai salah satu provinsi yang terintegrasi di dalam negara Republik Indonesia, Pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa minyak dan gas (migas) selama semester I tahun 2010 mencapai 5,40 persen. Sedangkan dengan migas, pertumbuhan ekonomi relatif kecil, hanya 2,44 persen. Sementara, struktur ekonomi Aceh masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, hotel, dan restoran dengan kontribusi kedua sektor tersebut mencapai angka hampir 45 persen dalam arti Pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa migas pada semester I tahun 2009 atas dasar harga berlaku Rp 27,81 triliun, dan pada semester I 2010 bertambah menjadi Rp 31,84 triliun. Sementara atas dasar harga konstan 2000 pada semester I 2009 sebesar Rp 13,61 triliun, tumbuh 5,40 persen pada semester I tahun 2010 menjadi Rp 14,35 triliun, Kondisi Ketenagakerjaan terus menunjukkan perbaikan. Menurut lapangan pekerjaan utama, sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Sementara menurut status pekerjaan utama, tenaga kerja didominasi oleh tenaga kerja berstatus buruh/ karyawan. Angka Kemiskinan terus membaik (BPS, 2011).

Kesejahteraan masyarakat petani meningkat tipis. Peningkatan kesejahteraan terutama terjadi pada kelompok petani tanaman perkebunan rakyat, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh dengan migas atas dasar harga

berlaku (ADHB) pada semester I tahun 2009 sebesar Rp 34,75 triliun, tumbuh menjadi Rp 37,84 triliun pada semester I tahun 2010. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2000, pada semester I tahun 2009 mencapai Rp 16,07 triliun, tumbuh 2,44 persen menjadi Rp 16,46 persen pada semester I tahun 2010 (BPS, 2011).

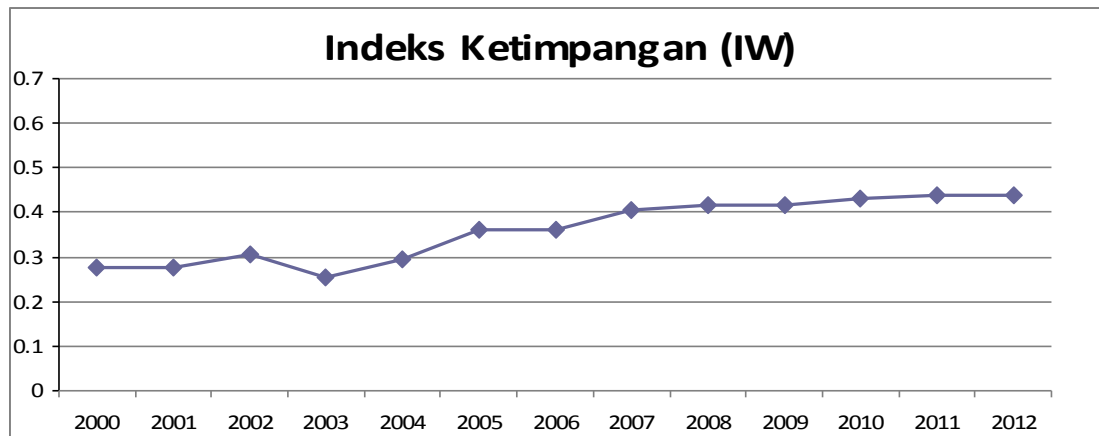
Akan tetapi, dengan tingginya angka-angka tersebut tidaklah menjamin telah terjadinya kemajuan yang merata antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Beberapa kabupaten/kota menunjukkan perkembangan pembangunan yang sangat cepat, sementara yang lainnya sebaliknya menunjukkan perkembangan yang lambat. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi dan sosial seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, kemiskinan dan tingkat pendidikan penduduk. Perbedaan tersebut lebih disebabkan oleh faktor-faktor seperti perbedaan sumberdaya dan letak geografis dari wilayah. Pertumbuhan ekonomi dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh juga sangat bervariasi dimana pada tahun 2004 tingkat pertumbuhan Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah kabupaten Aceh Barat dengan tingkat pertumbuhan mencapai 8,35 persen dan Kabupaten/Kota yang tingkat pertumbuhannya paling rendah adalah kabupaten Aceh Tengah sebesar -38,85 persen. Pada tahun 2005 tingkat pertumbuhan Kabupaten/Kota yang tertinggi adalah Aceh Timur dengan tingkat pertumbuhan ekonominya mencapai 54,01 persen (termasuk minyak bumi dan Gas) dan kabupaten atau/Kota yang tingkat pertumbuhan ekonominya yang paling rendah yaitu Kabupaten Aceh Barat sebesar -13,14 persen.

Pada tahun 2006 tingkat pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah Kota Sabang dan Aceh Tenggara mencapai 33,83 persen dan 33,5 persen dan kabupaten/kota yang tingkat pertumbuhannya paling rendah atau mengalami penurunan adalah kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Singkil sebesar -39,32 persen dan -38,99 persen. Pada tahun 2007 tingkat pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah Kabupaten Aceh Barat mencapai 6,10 persen dan kabupaten yang tingkat pertumbuhan ekonominya yang paling rendah adalah Kabupaten Aceh Utara (termasuk minyak bumi dan Gas) turun sebesar -11,83 persen.

Sementara pada tahun 2008 tingkat pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah Kabupaten Aceh Timur mencapai 10,47 persen (termasuk minyak bumi dan Gas) dan pertumbuhan yang paling rendah atau mengalami penurunan adalah Kota Lhokseumawe. Adapun tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh terhadap 23 Kabupaten/Kota tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 10,1 persen yaitu dari 40.374 menjadi 36.288 miliar (pasca bencana tsunami). Pada tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar 2,7 persen yaitu dari 36.288 menjadi 36.854. pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh kembali mengalami penurunan sebesar -2,36 persen yaitu dari 36.854 menjadi 35.983 miliar. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan sebesar -5,27 yaitu dari 35.983 menjadi 34.085 miliar, dan pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan sebesar -5,47 persen yaitu dari 34.085 menjadi 32.221 miliar, dan selanjutnya pada tahun mengalami peningkatan sebesar 2,64 persen dari 32.221 menjadi 33.071. Pertumbuhan ekonomi rata-rata di Provinsi Aceh selama 5 tahun terakhir sebesar -1,78 persen.

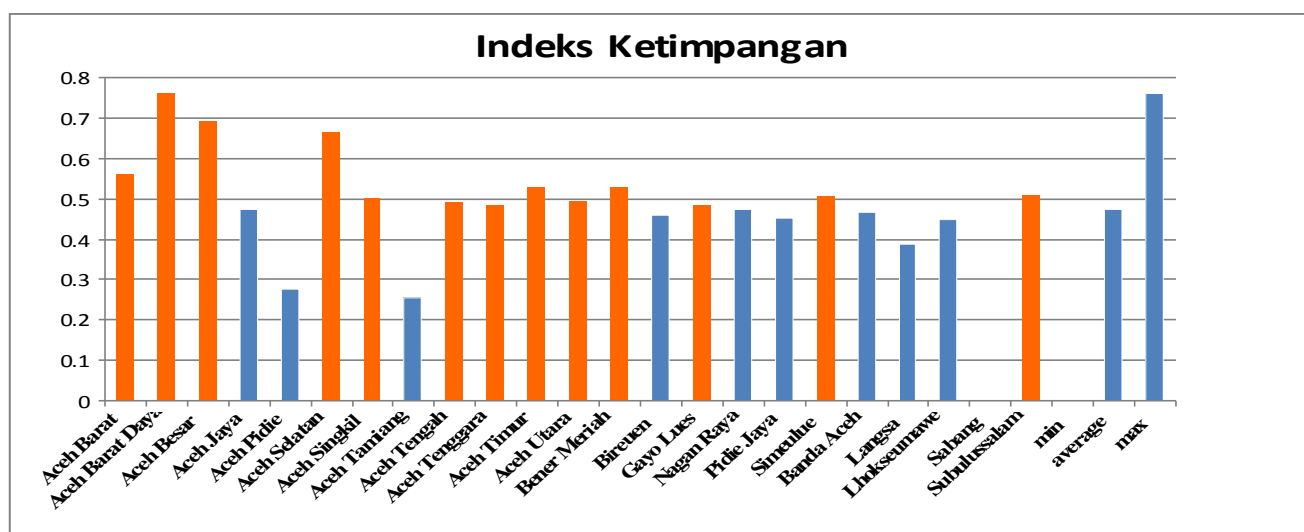
Namun apabila pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh terhadap 23 Kabupaten/Kota tidak memasukkan hasil minyak bumi dan Gas pertumbuhan selama lima tahun ini tumbuh secara positif. Ini mungkin karena menurunnya pendapatan dari hasil minyak bumi dan Gas. Adapun tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005 mencapai 1,2 persen yaitu dari 22.261 menjadi 22.532 miliar. Pada tahun 2006 terus mengalami peningkatan mencapai 7,7 persen yaitu dari 22.532 menjadi 24.268 miliar. Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami peningkatan sebesar 7,22 persen yaitu dari 24.268 menjadi 26.022 miliar. Pada tahun 2008

pertumbuhan ekonomi sedikit meningkat sebesar 1,8 persen yaitu dari 26.022 menjadi 26.511 miliar. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi terus meningkat sebesar 4,01 persen yaitu dari 26.511 menjadi 27.576 miliar, dan terus meningkat pada tahun 2010 sebesar 5,3 persen yaitu dari 27.576 menjadi 29.042. Jadi tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selama lima tahun terakhir mencapai 5,228 persen (Tidak termasuk minyak bumi dan Gas).



Gambar (1) Indeks ketimpangan pendapatan perkapita provinsi aceh

Berdasarkan Gambar (1) diatas dapat dilihat bgaimana kondii tingkat indeks keimpangan yang terjadi di provinsi Aceh. Dengan menggunakan indikator pendapatan perkapita kabupaten/kota di Provinsi Aceh menghasilkan indeks ketimpangan yang cukup tinggi, dan angka tersebut terus meningkat setiap tahunnya bila dibandingkan dengan tahun dasar penelitian yaitu tahun 2000 dengan angka indeks ketimpangan 0,272 dan terus meningkat pada tahun berikutnya yaitu tahun 2001 dan 2002 dengan indeks ketimpang masing-masing 0,277 dan 0, 304. Pada tahun 2003 mengalami perbaikan dengan menurunnya angka indeks ketimpangan 2,54, akan tetapi ditahun selanjutnya indeks ketimpangan kembali meningkat menjadi 0,294 pada tahun 2004. Pada tahun 2005 pasca terjadinya bencana alam Tsunami sangat berpengaruh terhadap pendapatan perkapita yang dapat meningkatkan indeks ketimpangan menjadi 0,362. Pada tahun 2006 dengan indikator tersebut sedikit membaik menunjukkan ideks ketimpangannya pada kisaran 0,360 namun angka tersebut masih berada diangka yang tinggi dan juga tidak terus membaik, justru pada tahun selanjutnya 2007 sampai tahun 2012 angka indeks ketimpangan terus saja meningkat dengan masing-masing tahun 2007 0.405,tahun 2008 0.416, tahun 2009 0,416, tahun 2010 0,432, tahun 2011 dengan angka indeks ketimpangan 0,437, dan tahun 2012 meningkat dengan angka indeks ketimpangan 0,440.



Gambar (2) Indeks Ketimpangan Kabupaten/Kota tahun 2012.

Indeks ketimpangan kabupaten/kota diprovinsi aceh masih cukup tinggi pada tahun 2012 (Gambar sdf2). Dimana terdapat 12 kabupaten dan 1 kota berada ditingkat indeks ketimpangan yang tinggi dan hanya 6 kabupaten dan 4 kota yang kondisi ketimpangannya yang berada dibawah rata-rata.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat ketimpangan perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan ketimpangan perekonomian antar Kabupaten Kota di Provinsi Aceh.
3. Strategi apakah yang dapat diaplikasikan guna menekan tingkat ketimpangan perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Besaran angka indeks ketimpangan perekonomian antar Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan perekonomian antar Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini hanya mengkaji pertumbuhan dan ketimpangan ekonomi antar kota/kabupaten yang dibatasi pada pengkajian variabel-variabel sosioekonomi, di mana wilayah yang dimaksudkan di sini mencakup 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Penentuan semua kabupaten/kota tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kabupaten/kota tersebut merupakan wilayah yang memberikan kontribusi yang besar di dalam pembangunan ekonomi Aceh dengan masa pembangunan yang sudah relatif lama, dan kabupaten/kota tersebut berada pada jalur wilayah tengah, pantai utara, timur, dan barat Aceh.

Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data seri waktu (*time series*) selama periode 2002-2014, yang bersumber dari Badan

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota dan Provinsi Aceh, Bappeda, dan instansi lain yang terkait.

Model Analisis

1. Indeks Williamson

Di dalam penelitian ini analisis dilakukan dengan menggunakan dua model, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan indeks Williamson, yaitu (Sjafrizal,2008:108):

$$CV_w = \frac{1}{\bar{y}} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \frac{p_i}{p}} \quad (1)$$

di mana :

- Vw = Indeks Ketimpangan Williamson
- y_i = PDRB perkapita daerah i
- \bar{y} = PDRB perkapita rata-rata seluruh daerah
- p_i = jumlah penduduk daerah i
- p = jumlah penduduk seluruh daerah

Kelebihan indeks Williamson adalah mudah dan praktis dalam melihat disparitas. Sedangkan kelemahannya adalah Indeks Williamson bersifat agregat sehingga tidak diketahui daerah mana saja yang memberikan kontribusi terhadap disparitas.

Seperti halnya Gini Koefisien, Indeks Williamson mempunyai nilai 0 dan 1. Indeks Williamson 0 berarti terjadi distribusi pemerataan sempurna dan 1 berarti ketimpangan sempurna. Sedangkan pola hubungan antara Indeks Williamson dan pertumbuhan ekonomi cenderung sama seperti yaitu terjadi *trade-off* dimana pada saat pertumbuhan ekonomi tinggi, ketimpangan (Indeks Williamson/CVw) juga tinggi. Ini artinya pada saat pertumbuhan ekonomi tinggi hanya terjadi pada wilayah tertentu saja tidak terdistribusi secara merata wilayah lainnya (Kuncoro, 2012: 256).

2. Persamaan Regresi Linier

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan Kabupaten/kota di Provinsi Aceh maka akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda (*Multiple Regressions*). Persamaan regresi linier berganda menurut Gujarati (2002) sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_{3+} + e_i \quad (2)$$

Dimana:

- Y = Dependent Variable
- α = Intercept
- β = Koefisien Regresi
- X = Independent Variable
- e_i = Faktor Pengganggu.

Kemudian model tersebut diformulasikan kedalam model penelitian sebagai berikut:

$$Ik = f(PDRB, SDM, SDA) \quad (3)$$

Sehingga:

$$Ik = a + b_1 PDRE + b_2 SDM + b_3 SDA + e_i \quad (4)$$

Dimana:

- Ik = Indeks Ketimpangan
- a = intercept
- $b_1 b_2 b_3$ = Koefisien regresi

PDRB = Pendapatan Regional
SDM = Sumber Daya Manusia
SDA = Sumber Daya Alam

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan ekonomi

Ketimpangan pertumbuhan sektor ekonomi mempunyai implikasi yang sangat serius bila tidak ditangani secara dini. Banyak persoalan sosial timbul akibat adanya ketimpangan pertumbuhan sektor ekonomi antar-daerah. Untuk itu kajian tentang ketimpangan ini sangat diperlukan sebagai dasar pengambilan kebijakan di masa yang akan datang.

Untuk tahun 2002 (lihat tabel IV.2), angka koefisien ketimpangan sebesar 0,275 sedikit meningkat menjadi 0,277 pada tahun 2003 dan kembali meningkat pada tahun 2004 menjadi 0,304. Pada tahun 2005 kembali menurun menjadi 0,254 dan meningkat lagi di tahun 2006 menjadi 0,294.

Tabel (1) Indeks Williamson Terhadap PDRB per kapita Kabupaten/
Kota di Provinsi Aceh Periode Tahun 2002 – 2014.

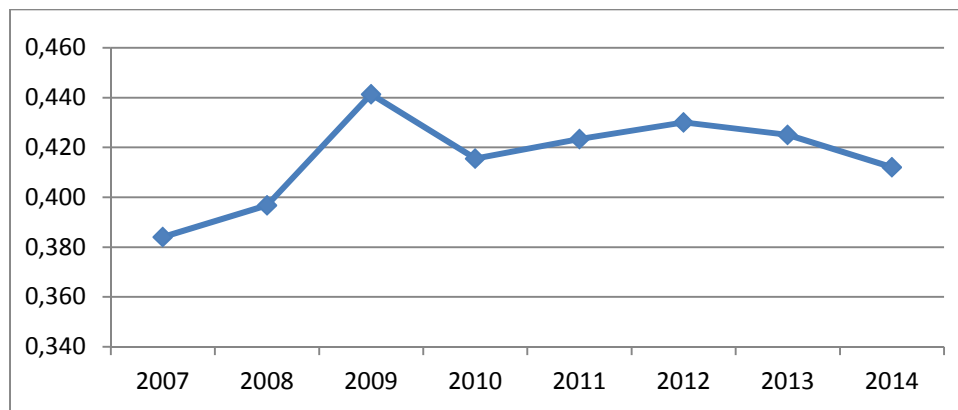
Tahun	Indeks Williamson
2002	0,275
2003	0,277
2004	0,304
2005	0,254
2006	0,294
2007	0,362
2008	0,360
2009	0,406
2010	0,417
2011	0,416
2012	0,432
2013	0,437
2014	0,440

Sumber: Lampiran 4 (data diolah)

Selanjutnya pada tahun 2007 kembali mengalami peningkatan menjadi 0,362 dan terus meningkat pada tahun 2008 menjadi 0,360, pada tahun 2009 meningkat menjadi 0,402 dan terus meningkat menjadi 0,417 pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 menurun menjadi 0,416 dan kembali meningkat pada tahun 2012 indeks ketimpangannya menjadi 0.432. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan selama ini semakin memperparah ketimpangan pertumbuhan sektor ekonomi antar kabupaten/kota di daerah ini. Dengan kata lain, daerah perkotaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sedangkan daerah pedesaan mengalami peningkatan yang relatif rendah.

Pengeluaran pemerintah (APBD) pada periode tahun 2007-2014 juga berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga terjadinya ketimpangan, pada tahun 2007 indeks williamson menunjukkan 0,384 dan meningkat menjadi 0,397 pada tahun 2008 selanjutnya tahun 2009 smakin meningkat menjadi 0,441 dan pada tahun 2010 menurun menjadi 0,416, selanjutnya pada tahun 2011

kembali meningkat menjadi 0,423 dan terus meningkat menjadi 0,430 pada tahun 2012. selanjutnya indeks ketimpangan pengeluaran pemerintah kembali menurun pada tahun 2013 dan 2014 dengan indeks ketimpangan masing-masing 0,425 dan 0,412 dan berada pada tingkat ketimpangan ekonomi wilayah yang tinggi atau sangat tidak merata. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ikut memberi andil dalam terjadinya ketimpangan pertumbuhan sektor ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh.



Gambar (3) Koefisien Indeks ketimpangan terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah (APBD) per kapita Kabupaten/Kota Periode Tahun 2007-2014

Analisis Data dan Pembahasan

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan terhadap hasil regresi dari model yang digunakan. Pengujian ini diperlukan untuk mengetahui hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala multikolinieritas, gejala auto korelasi, dan heteroskedastisitas. Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 20.

2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas terjadi jika terdapat hubungan yang sempurna di antara beberapa variabel atau semua variabel independen dari model regresi. Pengujian asumsi klasik Multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) kurang dari 10 dan nilai toleraninya diatas 0,1 atau 10% maka dapat disimpulkan dalam model bebas dari penyimpangan asumsi klasik. Multikolinieritas (Ghozali, 2005; Gujarati, 2003).

Tabel (2) Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel bebas	Tolerance	VIF	Keterangan
Pendapatan	0,162	6,164	Bebas Multikol
Angkatan Kerja	0,411	2,431	Bebas Multikol
Pertanian	0,129	7,781	Bebas Multikol

Sumber: Lampiran 2 Hasil pengolahan data dengan menggunakan Program SPSS 20

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen mempunyai nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransina diatas 0,1. Maka dapat disimpulkan bahwa model ini tidak ada hubungan linier yang sempurna antara variabel independen, maka tidak terdapat masalah multikolinieritas.

3. Uji Autokorelasi

Uji ini menjelaskan bahwa ada tidaknya korelasi diantara variabel diantara serangkaian pengamatan yang tersusun dalam tahapan uji Durbin Watson terhadap variabel dependen sebagai berikut (Gujarati, 2003):

Kriteria pengujian:

Deteksi Autokorelasi Positif:

Jika $d < dL$ maka terdapat autokorelasi positif,

Jika $d > dU$ maka tidak terdapat autokorelasi positif,

Jika $dL < d < dU$ maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.

Deteksi Autokorelasi Negatif:

Jika $(4 - d) < dL$ maka terdapat autokorelasi negatif,

Jika $(4 - d) > dU$ maka tidak terdapat autokorelasi negatif,

Jika $dL < (4 - d) < dU$ maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan.

Kriteria pengujian:

- Tingkat Kepercayaan = 5%

- Durbin Watson tabel: $K=3, n=13, d = 1,583$, maka:

$dL = 0,86124$;

$dU = 1,56212$

$4 - d = 4 - 1,583 = 2,417$

Berdasarkan analisis diatas maka dapat disimpulkan:

Deteksi Autokorelasi Positif:

Jika $1,583 < 0,86124$ maka terdapat autokorelasi positif---> Salah

Jika $1,583 > 1,56212$ maka tidak terdapat autokorelasi positif ---> Benar

Jika $0,86124 < 1,583 < 1,56212$ maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan---> Salah

Deteksi Autokorelasi Negatif:

Jika $2,417 < 0,86124$ maka terdapat autokorelasi negatif---> Salah

Jika $2,417 > 1,56212$ maka tidak terdapat autokorelasi negatif---> Benar

Jika $0,86124 < 2,417 < 1,56212$ maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat disimpulkan---> Salah

Maka dari hasil analisis regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak terdapat autokorelasi positif dan tidak terdapat autokorelasi negatif sehingga bisa disimpulkan sama sekali tidak terdapat autokorelasi.

4. Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual antar sesama pengamatan. Jika varian dan residual antar sesama pengamatan tetap maka disebut hemokedastisitas, dan jika sebaliknya maka disebut heterokedastisitas.

Untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Uji ini dilakukan dengan uji Glejser yang meregres terhadap variabel independen. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa semua nilai β_i tidak ada yang signifikan (taraf signifikan $> 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak ada masalah heterokedastisitas.

5. Hasil Regresi

Hasil output memberikan unstandardized beta Pendapatan (PDRB) selama 13 tahun sebesar -0,045 dan signifikan pada 0,025 yang berarti bahwa Pendapatan perkapita (PDRB) Provinsi Aceh mempunyai dampak yang negatif dan signifikan terhadap Indeks Ketimpangan ekonomi (Ik).

Untuk variabel angkatan kerja (SDM) hasil output memberikan unstandardized beta Sumber daya manusia (usia angkatan kerja) selama 13 tahun sebesar 0,064 dan secara parsial mempunyai dampak negatif dan tidak signifikan terhadap indeks ketimpangan pembangunan ekonomi dengan unstandardized betanya 0,064. Begitu juga dengan variabel sektor pertanian (SDA) secara parsial juga mempunyai dampak positif dan tidak signifikan terhadap indeks ketimpangan pembangunan dengan unstandardized betanya adalah 0,014 dan pada tingkat signifikan 0,698. Hal ini disebabkan oleh meratanya peranan variabel-variabel dalam analisis ini yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh terkecuali pada variabel pendapatan perkapita (PDRB) yang berpengaruh negative terhadap terjadinya ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Aceh.

Adapun Bentuk persamaan regresinya adalah:

$$Ik = 0.517 - 0,045X1 + 0,64X2 + 0,014X3 + ei (5)$$

6. Uji Koefisien Regresi

R² (Koefisien Determinasi) ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan secara komprehensif terhadap variabel dependen. Nilai R² (Koefisien Determinasi) mempunyai range antara 0-1. Semakin besar R² mengindikasikan semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Berdasarkan hasil regresi tersebut diperoleh R² (Koefisien determinasi) sebesar 0,877 artinya variabel dependen (IK) dalam model yaitu indeks ketimpangan kabupaten/kota di Provinsi Aceh dijelaskan oleh variabel independen (X) yaitu PDRB sektor ekonomi (X1), angkatan kerja atau SDM (X2) dan pertanian atau SDA (X3) sebesar 87,7 %, sedangkan sisanya sebesar 12,3% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dihipotesis atau variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Nilai F-statistik sebesar 21.420 dengan nilai signifikan 0,000, oleh karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen seperti Pendapatan (PDRB), angkatan kerja (SDM), serta pertanian (SDA) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ketimpangan perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Aceh secara simultan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliasuddin, 2002. Jurnal Triwulan Ekonomi dan Pembangunan: Ketimpangan Pembangunan Antar Kecamatan Di Aceh, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, *vol 1, No.1, 2002, hal. 27-35.*
- BPS. 2011. PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.
- Gujarati, Damodar, 2003. *Basic Econometric, (Fourth edition)*, USA, Mc Graw HillInternational.
- Jamal, Abd, dan Muhammad Abrar, 2008. Analisis Disparitas Sosioekonomi Intra dan Antarwilayah (Intra and Interregional) Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Laporan Penelitian, Lemlit Unsyiah.*
- Kuncoro, 2012. *Ekonomika Industri Indonesia : Menuju Negara Industri Baru 2030?*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Rezeki, Rina, 2007. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Teknik: *Disparitas Sub Wilayah (Kasus Perkembangan Antar Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar)*, Undip, 2007
- Sugiharto, 2000. *Pembangunan dan Pengembangan Wilayah*, USU Press, Medan. 2006.